

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER DESERSI DALAM MASA
DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD
DI WILAYAH KODAM ISKANDAR MUDA**

Rahmadi*

Dr. Panca Sarjana Putra, SH.M.H **

Dr. Mukidi, SE., SH., M.H ***

ABSTRAK

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah Kodam Iskandar Muda, bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris. Analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dimana dalam menganalisis/pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui perundang-undangan terkait dan kepustakaan. Kemudian data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas.

Pengaturan hukum tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda diatur dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.. Pertanggungjawaban pidana, anggota TNI yang melakukan tindak pidana adalah pidana utama yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan yang terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar secara garis besar karena penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer masih banyak terjadi tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Upaya yang dilakukan adalah upaya yang bersifat preventif yaitu memperketat pengawasan absen kehadiran dalam apel prajuritserta upaya yang bersifat represif yaitu melalui upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada pelaku atau terdakwa.

Kata Kunci: Penyelesaian, TNI, Desersi.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**SETTLEMENT OF MILITARY CRIMINAL ACT OF DESERTION DURING
PEACETIME COMMITTED BY TNI AD SOLDIERS IN THE
ISKANDAR MUDA KODAM AREA**

Rahmadi*

Dr. Panca Sarjana Putra, SH.M.H **

Dr. Mukidi, SE., SH., M.H ***

ABSTRACT

The crime of desertion is a purely military crime committed by a soldier because it is against the law and contrary to the Law. The problem in this thesis is how to regulate the legal act of military desertion committed by Indonesian Army soldiers in the Iskandar Muda Military Command area, what is the form of legal accountability for Indonesian Army soldiers who commit the crime of desertion in the Iskandar Muda Military Command area, what are the obstacles and efforts to resolve cases of desertion committed by Indonesian Army soldiers in the Iskandar Muda Military Command area.

The research conducted is normative research and is supported by empirical legal data. The data analysis used is a qualitative approach to primary data and secondary data where in analyzing/processing the data, the primary data obtained through related legislation and literature is first organized. Then the collected data is then discussed. The legal provisions for the military crime of desertion committed by Indonesian Army soldiers in the Iskandar Muda Military Command area are regulated in Articles 87 and 89 of the Military Criminal Code, while regarding the crime of desertion in absentia examination is regulated in Article 141 paragraph (10) and Article 143 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. Criminal liability, TNI members who commit crimes are the main punishment consisting of the death penalty, imprisonment, and additional punishment consisting of dismissal from military service, demotion, revocation of certain rights.

Based on the results of the study, it is understood that the obstacles to resolving cases of the crime of desertion committed by Indonesian Army soldiers in the Iskandar Military Command area are generally because the investigations carried out by Military Police investigators still often do not meet formal and material requirements. The efforts made are preventive efforts, namely tightening supervision of absences in soldier roll calls and repressive efforts, namely through law enforcement efforts that can be imposed on the perpetrators or defendants.

Keywords: Settlement, TNI, Desertion..

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*